



*Rudy C Tarumingkeng: Transformasi Ekonomi dan Politik
Kontemporer di Era Ketidakpastian Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

8 April 2026

TRANSFORMASI EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER DI ERA KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Abstrak

Makalah ini membahas transformasi ekonomi dan politik kontemporer dalam konteks dunia yang semakin ditandai oleh ketidakpastian global, fragmentasi perdagangan, persaingan geopolitik, tekanan sosial, dan revolusi digital berbasis kecerdasan buatan. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa perubahan ekonomi dewasa ini tidak dapat dipahami hanya melalui indikator pertumbuhan, inflasi, atau perdagangan, karena dinamika tersebut selalu dibentuk oleh relasi kekuasaan, kualitas institusi, kapasitas negara, perilaku korporasi global, dan respons masyarakat. Dalam lanskap mutakhir, ekonomi dunia masih bertumbuh tetapi dalam kondisi yang rapuh. IMF dalam World Economic Outlook Oktober 2025 memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, sedangkan WTO memperingatkan bahwa volume perdagangan barang dunia pada 2025 dapat berbalik menjadi kontraksi 0,2 persen akibat lonjakan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. Pada saat yang sama, UNDP menunjukkan bahwa kenaikan Human Development Index global berada pada laju terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu, sementara V-Dem melaporkan bahwa 74 persen populasi dunia kini hidup dalam rezim autokratis dan tingkat demokrasi rata-rata warga dunia telah mundur ke level 1978. Transformasi digital dan AI

juga mempercepat konsentrasi kekuasaan, karena kapasitas komputasi, data, cloud, dan inovasi AI sangat terkonsentrasi di sedikit negara dan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, penurunan kemiskinan menjadi 8,25 persen, dan turunnya gini ratio menjadi 0,363 menunjukkan perkembangan yang penting, tetapi belum menghapus persoalan dualisme wilayah, kerentanan sosial, dan keterpaparan terhadap guncangan global, seperti terlihat pada intervensi Bank Indonesia ketika rupiah mencapai rekor terendah pada 7 April 2026. Makalah ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi-politik kontemporer menuntut sintesis baru: negara yang strategis namun akuntabel, pasar yang inovatif namun tidak oligarkis, serta masyarakat yang adaptif namun tetap terlindungi. ([IMF](#))

Kata kunci: ekonomi politik, ketidakpastian global, pertumbuhan, ketimpangan, kekuasaan, geoeconomics, AI, Indonesia

Transformasi Ekonomi dan Politik Kontemporer di Era Ketidakpastian Global

1. Pendahuluan

Membahas transformasi ekonomi dan politik kontemporer berarti memasuki wilayah di mana batas antara pasar dan kekuasaan semakin kabur. Pada masa lalu, ekonomi sering dipresentasikan sebagai ranah rasionalitas, efisiensi, dan kalkulasi teknis, sedangkan politik dipahami sebagai ranah kompetisi kekuasaan, ideologi, dan legitimasi. Namun perkembangan global beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemisahan seperti itu semakin tidak memadai. Harga energi

dipengaruhi perang dan blokade. Arah investasi dipengaruhi sanksi, tarif, dan keamanan rantai pasok. Kepercayaan pasar dipengaruhi kualitas institusi politik. Bahkan perilaku konsumsi dan opini publik kini dipengaruhi oleh platform digital yang bekerja sekaligus sebagai perusahaan, media, dan infrastruktur sosial. Dengan demikian, ekonomi politik kontemporer harus dibaca sebagai medan di mana negara, korporasi, masyarakat, dan teknologi saling membentuk secara terus-menerus. ([World Trade Organization](#))

Dunia saat ini tidak berada dalam situasi stagnasi total, tetapi berada dalam kondisi pertumbuhan yang rentan. IMF memproyeksikan pertumbuhan global turun dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, sementara WTO menyatakan prospek perdagangan global memburuk tajam akibat lonjakan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. Dalam laporan WTO, volume perdagangan barang dunia yang sebelumnya diasumsikan masih bertumbuh 2,7 persen pada 2025 justru disesuaikan menjadi minus 0,2 persen. Ini bukan sekadar perubahan teknis statistik, melainkan indikasi bahwa pasar dunia sedang diatur ulang oleh logika kekuasaan dan keamanan. Ketika ketidakpastian kebijakan menjadi penentu investasi dan perdagangan, maka rasionalitas ekonomi tidak lagi dapat dipahami tanpa membaca konfigurasi politik global. ([IMF](#))

Ketidakpastian global itu pada awal April 2026 bahkan memperoleh bentuk yang sangat konkret. Reuters melaporkan bahwa IMF Managing Director Kristalina Georgieva memperingatkan perang di Timur Tengah akan menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan global, terutama karena disrupsi pasokan energi, pupuk, dan rantai pasok yang lebih luas. Pada saat yang sama, survei yang juga dilaporkan Reuters menunjukkan kekhawatiran bank-bank sentral terhadap ketegangan geopolitik melonjak tajam, menegaskan bahwa risiko politik kini menjadi komponen inti dalam stabilitas ekonomi

makro. Dalam kerangka ini, ketidakpastian global tidak lagi dapat dianggap sebagai "gangguan eksternal" sesaat, melainkan kondisi struktural baru yang memengaruhi keputusan fiskal, moneter, perdagangan, investasi, dan perlindungan sosial. ([Reuters](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan bagaimana transformasi ekonomi dan politik kontemporer harus dipahami dalam era ketidakpastian global. Fokus analisis diarahkan pada lima dimensi utama, yakni perubahan tatanan ekonomi dunia, kembalinya negara strategis, dinamika pertumbuhan dan ketimpangan, kebangkitan kekuasaan digital berbasis AI, serta implikasinya bagi legitimasi politik dan posisi Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis laporan resmi lembaga internasional dan nasional, tulisan ini berargumen bahwa tantangan terbesar zaman ini bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan membangun tatanan yang mampu menghubungkan pertumbuhan dengan keadilan sosial, inovasi dengan pemerataan, serta negara yang kuat dengan akuntabilitas demokratis. ([IMF](#))

2. Kerangka Konseptual: Ekonomi Politik sebagai Analisis Relasi Kuasa

Ekonomi politik berangkat dari asumsi bahwa pasar tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Harga, upah, tarif, subsidi, suku bunga, hak kepemilikan, dan aturan persaingan tidak lahir secara alamiah, melainkan melalui keputusan-keputusan kelembagaan dan politik. Karena itu, pertanyaan ekonomi politik tidak berhenti pada "berapa besar pertumbuhan" atau "berapa tinggi produktivitas", tetapi bergerak lebih jauh kepada "siapa yang memperoleh manfaat", "siapa yang menanggung biaya", dan "siapa yang memiliki kuasa membentuk aturan main". Dalam dunia kontemporer, pertanyaan ini semakin relevan karena sumber kekuasaan meluas dari negara ke

korporasi digital, arsitektur data, layanan cloud, pusat komputasi, dan jejaring keuangan global. ([World Bank](#))

Kerangka ini penting karena banyak gejala ekonomi global dewasa ini tidak bisa lagi dijelaskan oleh teori pasar yang netral. WTO menegaskan bahwa lonjakan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan menjadi sebab utama memburuknya prospek perdagangan dunia. IMF juga menunjukkan bahwa perlambatan global dipengaruhi perubahan prioritas kebijakan dan memburuknya iklim ketidakpastian. Artinya, pasar global saat ini bukan sekadar arena pertukaran, tetapi arena yang dibentuk dan diintervensi secara aktif oleh negara, terutama negara-negara besar. Dalam situasi seperti ini, *geo-economics*—yakni penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis dan politik—menjadi kerangka yang makin sentral untuk memahami ekonomi dunia. ([World Trade Organization](#))

Selain itu, ekonomi politik kontemporer juga harus dipahami sebagai studi tentang legitimasi. Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu berarti ketenangan sosial. Jika pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka ketidakpuasan sosial akan meningkat. Jika negara menjadi lebih strategis tetapi tidak akuntabel, maka masyarakat dapat melihat kebijakan ekonomi bukan sebagai proyek pembangunan bersama, melainkan sebagai alat konsolidasi elite. Jika teknologi meningkatkan efisiensi tetapi manfaatnya terkonsentrasi, maka inovasi dapat berubah menjadi sumber ketimpangan baru. Dengan kata lain, transformasi ekonomi kontemporer hanya dapat dibaca dengan utuh bila kita menghubungkan produksi, distribusi, institusi, dan legitimasi ke dalam satu analisis. ([Human Development Reports](#))

3. Transformasi Tataan Ekonomi Global: Dari Globalisasi Efisiensi ke Globalisasi Ketahanan

Salah satu transformasi terpenting dalam ekonomi kontemporer adalah pergeseran dari globalisasi berbasis efisiensi menuju globalisasi

berbasis ketahanan. Pada periode sebelumnya, perusahaan cenderung mengoptimalkan rantai pasok berdasarkan biaya produksi terendah, skala, dan integrasi pasar. Namun WTO mencatat bahwa pada 2025 prospek perdagangan memburuk tajam akibat tarif dan ketidakpastian kebijakan. Dalam adjusted forecast WTO, perdagangan barang dunia 2025 diperkirakan berkontraksi 0,2 persen; bahkan dalam simulasi jika ketidakpastian menyebar lebih luas, penurunan laju pertumbuhan perdagangan dapat menjadi jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dan negara kini tidak lagi semata-mata mengejar efisiensi, tetapi juga keamanan pasokan, stabilitas politik, dan kompatibilitas geopolitik. ([World Trade Organization](#))

Perubahan ini menandai lahirnya ekonomi dunia yang lebih terfragmentasi. Rantai pasok, semikonduktor, data, energi, dan mineral kritis bukan lagi sekadar komponen produksi, tetapi menjadi aset strategis. Ketika akses terhadap komponen vital dapat dibatasi melalui kontrol ekspor, sanksi, atau blokade logistik, maka perdagangan berubah menjadi instrumen kekuasaan. WTO sendiri menegaskan bahwa trade policy uncertainty bertindak sebagai drag terhadap perdagangan dan pertumbuhan. Dengan demikian, transformasi ekonomi global hari ini bukan hanya tentang siapa yang lebih efisien, tetapi juga siapa yang lebih tahan terhadap disrupsi dan siapa yang memiliki kapasitas untuk mengelola risiko sistemik. ([World Trade Organization](#))

Ketidakpastian ini makin dalam ketika dikaitkan dengan geopolitik energi. Reuters melaporkan bahwa perang di Timur Tengah pada awal April 2026 telah memicu gangguan pasokan energi yang dinilai IMF sebagai salah satu yang paling serius, dengan implikasi terhadap minyak, gas, pupuk, dan rantai pasok lain. IMF, IEA, dan Bank Dunia bahkan membentuk kelompok koordinasi untuk merespons dampak ekonomi dan energi dari konflik tersebut. Fakta ini menegaskan bahwa dunia sedang bergerak ke arah di mana keamanan energi, keamanan

pangan, dan keamanan logistik tidak dapat dipisahkan dari keamanan nasional dan strategi pembangunan. Transformasi ekonomi global, karenanya, berlangsung di bawah bayang-bayang shock geopolitik yang sewaktu-waktu dapat membatalkan asumsi pasar tentang kestabilan. ([Reuters](#))

Pada tingkat pembangunan, perubahan ini juga mempersempit jalur klasik industrialisasi. UNDP menyatakan bahwa jalur pembangunan yang selama ini menciptakan pekerjaan dalam skala besar dan menurunkan kemiskinan melalui perluasan manufaktur serta ekspor ke pasar internasional kini sedang menyempit. Laporan itu menambahkan bahwa perlambatan kemajuan pembangunan manusia global terkait pula dengan tertekannya ruang pertumbuhan inklusif di negara berkembang. Ini berarti bahwa transformasi ekonomi global dewasa ini tidak hanya mengubah pola perdagangan, tetapi juga mengubah "tangga naik" pembangunan itu sendiri. Negara-negara berkembang dipaksa mencari strategi baru ketika manufaktur padat karya, akses pasar stabil, dan kepastian global tidak lagi sekuat sebelumnya. ([Human Development Reports](#))

4. Kembalinya Negara Strategis dan Politik Keamanan Ekonomi

Dalam situasi yang makin tidak pasti, negara kembali tampil sebagai aktor ekonomi utama. Hal ini tidak berarti negara sebelumnya menghilang, tetapi perannya kini lebih aktif dan strategis. Negara tidak lagi cukup hanya menjaga inflasi atau stabilitas fiskal; ia kini juga harus menentukan sektor strategis, melindungi rantai pasok kritis, menyusun kebijakan industri, mengatur data, dan merespons ketegangan keamanan yang berdampak langsung pada ekonomi. IMF dalam bab April 2026 tentang defense spending bahkan menempatkan ekonomi dunia di bawah tema "Global Economy in the Shadow of War", yang dengan sendirinya menunjukkan bagaimana isu keamanan kini masuk ke jantung analisis makroekonomi. ([IMF](#))

Bab IMF tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pertahanan dapat memberi dorongan output jangka pendek, dengan multiplier yang rata-rata mendekati 1, tetapi juga membawa trade-off yang berat dalam jangka menengah: defisit yang lebih tinggi, potensi pemotongan belanja sosial, pelemahan neraca eksternal, dan ketahanan ekonomi yang lebih rendah jika pembiayaannya tidak tertata. IMF juga menegaskan bahwa banyak negara sekaligus menghadapi tuntutan investasi di infrastruktur, layanan publik, transisi hijau, kesehatan, dan penuaan penduduk. Ini berarti transformasi politik kontemporer tidak hanya berupa naiknya belanja keamanan, tetapi juga perebutan prioritas fiskal. Dalam bahasa sederhana, era ketidakpastian global memaksa negara menyeimbangkan “guns, growth, and welfare” pada saat yang sama. ([IMF](#))

Namun kembalinya negara tidak otomatis berarti perbaikan. Negara strategis dapat menjadi mesin transformasi bila memiliki kapasitas, koordinasi, dan akuntabilitas. Sebaliknya, negara strategis juga dapat menjadi kanal distribusi rente bila kebijakan industrial, perlindungan, dan belanja keamanan hanya menguntungkan kelompok terbatas. V-Dem mengingatkan bahwa demokrasi global sedang mengalami kemunduran tajam, dengan lebih banyak orang hidup dalam autokrasi daripada dalam gabungan demokrasi elektoral dan liberal. Dalam kondisi demikian, perluasan peran negara harus selalu dibaca bersama risiko pemusatan kuasa. Negara yang kuat memang dibutuhkan di era ketidakpastian, tetapi tanpa checks and balances negara yang kuat bisa dengan mudah bergeser menjadi negara yang eksklusif. ([v-dem.net](#))

Karena itu, transformasi politik kontemporer sesungguhnya bukan sekadar “kembalinya negara”, melainkan perdebatan tentang bentuk negara seperti apa yang dibutuhkan. Dunia memerlukan negara yang mampu bertindak cepat dalam menghadapi krisis energi, perang dagang, AI, dan ketidakstabilan keuangan. Namun masyarakat juga

memerlukan negara yang terbuka terhadap pengawasan, mampu mempertanggungjawabkan prioritas fiskalnya, dan tidak menjadikan ketidakpastian global sebagai alasan permanen untuk menyempitkan ruang kebebasan sipil. Di sinilah ekonomi politik kontemporer memperlihatkan bahwa efektivitas dan legitimasi harus dibangun bersama, bukan dipertentangkan secara dangkal. ([IMF](#))

5. Pertumbuhan di Bawah Tekanan: Ekonomi yang Tumbuh, tetapi Rapuh

Pertumbuhan ekonomi global pada dasarnya belum runtuh, tetapi tumbuh dalam keadaan rapuh dan sensitif terhadap guncangan. IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026. Secara angka, ini masih menunjukkan ekspansi. Namun bila dipadukan dengan turunnya prospek perdagangan dunia, naiknya tarif, tingginya ketidakpastian kebijakan, dan meningkatnya risiko geopolitik, maka pertumbuhan tersebut terlihat kurang kokoh. Pertumbuhan yang bergantung pada adaptasi sektor swasta dan stimulus terbatas dapat cepat melemah bila muncul shock besar pada energi, keuangan, atau keamanan. ([IMF](#))

WTO menekankan bahwa tanpa lonjakan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan, prospek perdagangan global seharusnya jauh lebih baik. Dengan kata lain, perlambatan yang kita lihat sekarang bukan semata-mata akibat kelemahan permintaan alamiah, tetapi juga akibat keputusan-keputusan politik. Ini penting secara konseptual: pasar tidak gagal sendiri; ia dibuat lebih rapuh oleh struktur insentif dan kebijakan yang berubah. Ketika perusahaan menunda investasi atau mengalihkan produksi karena ketidakpastian kebijakan, pertumbuhan menjadi semakin dipengaruhi oleh persepsi risiko, bukan hanya oleh harga dan produktivitas. ([World Trade Organization](#))

Reuters melaporkan pada 7 April 2026 bahwa lonjakan harga minyak akibat perang Iran meningkatkan risiko resesi global, memukul pabrik-pabrik di beberapa negara, meningkatkan ongkos pupuk dan energi, serta mendorong lembaga-lembaga internasional menyiapkan revisi pertumbuhan ke bawah. Sekalipun tidak semua negara akan terdampak sama, logika umumnya sama: shock energi menekan rumah tangga melalui inflasi, menekan dunia usaha melalui biaya input, dan menekan negara melalui kebutuhan fiskal yang lebih besar untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam kondisi demikian, pertumbuhan bukan lagi sekadar fungsi dari investasi dan konsumsi, tetapi juga fungsi dari ketahanan energi dan kemampuan meredam harga.

([Reuters](#))

Ketika pertumbuhan terjadi dalam suasana semacam itu, kualitas pertumbuhan menjadi sama pentingnya dengan kecepatannya. Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi tanpa peningkatan produktivitas jangka panjang cenderung rapuh. Pertumbuhan yang bertumpu pada boom komoditas tanpa diversifikasi industri cenderung mudah terbalik ketika harga berbalik. Pertumbuhan yang ditopang stimulus fiskal tetapi tanpa perbaikan kapasitas negara juga dapat menimbulkan tekanan utang. Maka transformasi ekonomi kontemporer mengharuskan negara dan masyarakat membaca pertumbuhan bukan sebagai angka tunggal, tetapi sebagai hasil dari struktur produksi, daya tahan fiskal, kapasitas teknologi, dan legitimasi institusional. ([IMF](#))

6. Ketimpangan Sosial dan Krisis Pembangunan Manusia

Jika pertumbuhan adalah sisi pertama dari transformasi ekonomi kontemporer, maka ketimpangan adalah sisi kedua yang tidak dapat diabaikan. Ketimpangan bukan hanya persoalan distribusi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, teknologi, dan representasi politik. UNDP melaporkan bahwa

meskipun nilai HDI global diproyeksikan mencapai rekor tertinggi pada 2024, kenaikannya akan menjadi yang terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu. Lebih mengkhawatirkan lagi, jarak antara negara dengan HDI sangat tinggi dan negara dengan HDI rendah, yang sebelumnya menyempit selama beberapa dekade, justru melebar dalam empat tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa dunia yang tampak terus maju secara teknologi belum tentu menjadi dunia yang semakin setara secara manusiawi. ([Human Development Reports](#))

UNDP juga menekankan bahwa penurunan HDI global pada 2020–2021 belum benar-benar pulih, dan jalur menuju dunia dengan very high HDI yang sebelumnya diperkirakan bisa dicapai sekitar 2030 kini tertunda hingga beberapa dekade. Dengan kata lain, pembangunan manusia global bukan hanya melambat, tetapi juga kehilangan momentum historisnya. Hal ini penting karena ia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pascapandemi tidak otomatis mengembalikan kualitas hidup, keamanan sosial, dan kesempatan antargenerasi. Ketika pemulihan berlangsung tidak merata, ketimpangan menjadi lebih dari sekadar statistik; ia menjadi pengalaman sosial yang nyata. ([Human Development Reports](#))

Pasar kerja global memperkuat gambaran ini. ILO melaporkan bahwa pada 2024 pertumbuhan lapangan kerja hanya cukup mengikuti pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran global bertahan di 5 persen. Namun pengangguran kaum muda tetap tinggi di 12,6 persen, sedangkan kerja informal dan working poverty telah kembali ke tingkat pra-pandemi. ILO juga menyoroti bahwa negara-negara berpendapatan rendah menghadapi kesulitan paling besar dalam menciptakan pekerjaan yang layak. Artinya, masalah dunia kerja kontemporer bukan hanya soal ketersediaan pekerjaan, tetapi juga soal kualitas, perlindungan, dan keberlanjutan pekerjaan itu sendiri. ([International Labour Organization](#))

Secara sosiologis, kondisi ini melahirkan masyarakat yang hidup dalam paradoks. Secara makro, ekonomi mungkin masih bertumbuh. Secara mikro, banyak rumah tangga tetap merasa rapuh, karena pendapatan riil tertekan, pekerjaan cenderung informal atau kontraktual, dan layanan publik belum cukup cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di sinilah ketimpangan berubah menjadi persoalan politik. Warga yang merasa tertinggal akan lebih mudah kehilangan kepercayaan pada institusi, lebih mudah menerima narasi kemarahan, dan lebih mudah melihat sistem ekonomi-politik sebagai arena yang menguntungkan elite. Maka, transformasi ekonomi kontemporer tanpa agenda pemerataan akan selalu menyimpan benih delegitimasi. ([International Labour Organization](#))

7. Kapitalisme Digital, AI, dan Bentuk Baru Kekuasaan

Tidak ada transformasi yang lebih menentukan bagi ekonomi dan politik kontemporer selain revolusi digital dan AI. Namun penting untuk menekankan bahwa AI bukan hanya teknologi baru; ia adalah struktur kekuasaan baru. World Bank dalam Digital Progress and Trends Report 2025 menekankan adanya pembelahan tajam: sebagian besar inovasi AI masih terkonsentrasi di negara berpendapatan tinggi, meskipun negara berkembang mulai aktif mengadopsi “small AI” untuk dampak lokal. Laporan itu merumuskan empat fondasi kesiapan AI—connectivity, compute, context, dan competency—dan menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam membangun fondasi-fondasi tersebut. Dengan kata lain, AI bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem yang membutuhkan listrik, infrastruktur digital, server, data yang relevan, dan keterampilan manusia. ([World Bank](#))

Konsentrasi kekuasaan dalam AI sangat nyata. UNCTAD menyebut bahwa nilai pasar AI diproyeksikan mencapai US\$4,8 triliun pada 2033, tetapi manfaatnya tetap sangat terkonsentrasi. Hanya 100

perusahaan—terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok—yang menyumbang sekitar 40 persen belanja R&D korporasi global, sementara 118 negara tidak terwakili dalam diskusi utama tata kelola AI. UNCTAD juga memperingatkan bahwa hingga 40 persen pekerjaan global dapat terdampak AI, yang berarti AI bisa menghasilkan produktivitas baru sekaligus tekanan otomatisasi dan ketimpangan baru. Dalam perspektif ekonomi politik, data ini menunjukkan bahwa AI adalah medan kompetisi kekuasaan, bukan sekadar arena inovasi teknis. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Bank Dunia memperkuat gambaran tersebut dengan data yang lebih struktural. Di luar China dan India, negara berpendapatan rendah dan menengah hanya menyumbang 4 persen startup AI, kurang dari 1 persen pendanaan startup AI, paten GenAI, dan model AI penting, padahal kelompok negara ini mencakup 48 persen populasi dunia dan 15 persen PDB global. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen lalu lintas global ChatGPT pada pertengahan 2025 berasal dari negara berpendapatan menengah. Ini berarti banyak negara berkembang sudah menjadi pengguna aktif AI, tetapi belum menjadi produsen utama model, infrastruktur, dan nilai tambahnya. Ketimpangan semacam ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak otomatis menghasilkan kedaulatan teknologi. ([World Bank](#))

Konsentrasi kuasa digital juga terlihat dalam infrastruktur internet. Kajian Bank Dunia tentang antitrust dan platform digital menunjukkan bahwa enam perusahaan AS menghasilkan lebih dari 40 persen aliran data internet dunia. Dalam sampel 17 negara berpendapatan rendah dan menengah, sekitar 60 persen dari 25 situs paling populer dimiliki lima perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Laporan itu menekankan bahwa persaingan di pasar digital tidak lagi cukup diukur dengan harga; analisis persaingan harus memperhitungkan kualitas layanan, perlindungan data pribadi, risiko merger antipersaingan, dan ekosistem platform yang saling bertukar data. Ini menunjukkan bahwa

kapitalisme digital memperluas definisi kekuasaan: yang dominan bukan hanya yang memiliki pabrik atau sumber daya alam, tetapi juga yang menguasai arsitektur data, perhatian, dan komputasi. ([World Bank](#))

Bagi negara berkembang, implikasinya sangat besar. Jika fondasi AI tidak dibangun, mereka akan tetap menjadi pasar dan sumber data bagi perusahaan global. Jika regulasi persaingan dan perlindungan data lemah, maka konsentrasi kuasa digital akan semakin sulit dikoreksi. Jika pendidikan dan keterampilan tidak diperbarui, maka produktivitas AI justru akan memperdalam jurang antara pekerja yang mampu beradaptasi dan mereka yang tersisih. Karena itu, transformasi ekonomi-politik kontemporer di era AI sesungguhnya menuntut agenda industrial policy baru: bukan hanya hilirisasi komoditas fisik, tetapi juga pembangunan kapasitas data, cloud, komputasi, model lokal, dan governance digital yang berorientasi pada kepentingan publik. ([World Bank](#))

8. Demokrasi, Legitimasi, dan Masyarakat dalam Tekanan

Transformasi ekonomi kontemporer tidak dapat dipisahkan dari transformasi politik. V-Dem melaporkan bahwa pada akhir 2025 dunia terdiri atas 92 autokrasi dan 87 demokrasi, dengan 74 persen populasi dunia hidup dalam autokrasi. Laporan yang sama menyatakan bahwa tingkat demokrasi yang dialami warga rata-rata dunia kini kembali ke level 1978, dan hanya 7 persen populasi dunia yang hidup dalam demokrasi liberal. Kebebasan berekspresi juga disebut sebagai aspek demokrasi yang paling banyak diserang, memburuk di 44 negara pada 2025. Data ini bukan sekadar gambaran politik formal; ia menunjukkan bahwa ruang koreksi publik terhadap kekuasaan ekonomi dan politik sedang menyempit di banyak tempat. ([v-dem.net](#))

Kemunduran demokrasi ini penting bagi ekonomi politik karena legitimasi institusi sangat terkait dengan persepsi keadilan. Masyarakat

tidak menilai sistem hanya dari seberapa tinggi pertumbuhan, tetapi dari apakah harga kebutuhan pokok terkendali, apakah anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, apakah mobilitas sosial masih mungkin, dan apakah kritik terhadap kebijakan masih dimungkinkan. Ketika pertumbuhan tidak memberi rasa aman, dan ketika ruang ekspresi publik menyempit, maka masyarakat cenderung mudah menerima politik kemarahan atau politik ketertiban yang menjanjikan penyelesaian cepat. Masalahnya, solusi yang terlalu tersentralisasi sering justru mempersempit koreksi dan memperdalam ketimpangan institusional. ([International Labour Organization](#))

Di era digital, krisis legitimasi ini menjadi lebih kompleks. Platform digital memperluas ruang komunikasi, tetapi juga dapat mempercepat polarisasi, manipulasi informasi, dan konsentrasi pengaruh. Ketika perusahaan digital berperan sekaligus sebagai infrastruktur komunikasi, perantara ekonomi, dan pengumpul data, maka ruang publik ikut dipengaruhi logika komersial dan algoritmik. Kajian Bank Dunia tentang platform digital mengingatkan bahwa analisis pasar digital harus memperhitungkan perlindungan data pribadi dan kualitas kompetisi, bukan sekadar harga. Secara politik, hal ini berarti demokrasi masa kini tidak hanya menghadapi tantangan dari negara yang terlalu kuat, tetapi juga dari korporasi digital yang terlalu dominan. ([World Bank](#))

Karena itu, transformasi politik kontemporer menuntut pembacaan yang lebih luas daripada sekadar siapa berkuasa melalui pemilu. Pertanyaan yang relevan adalah apakah negara masih dapat dikoreksi, apakah masyarakat sipil masih bisa bersuara, apakah media dan platform masih memungkinkan pluralitas, dan apakah kebijakan ekonomi masih dapat diperdebatkan secara terbuka. Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini semakin negatif, maka kapasitas negara yang lebih besar di era ketidakpastian global bisa berubah menjadi alat pemusatan kekuasaan yang sulit diawasi. Transformasi ekonomi

dan politik, dengan demikian, harus selalu dibaca bersama pertanyaan tentang akuntabilitas. (v-dem.net)

9. Indonesia dalam Era Ketidakpastian Global

Indonesia menawarkan contoh penting tentang bagaimana negara berkembang besar menavigasi lanskap global yang tidak stabil. BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024. PDB nominal mencapai Rp23.821,1 triliun, dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar US\$5.083. Pertumbuhan kuartal IV 2025 secara tahunan mencapai 5,39 persen, dengan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran berasal dari pembentukan modal tetap bruto. Data ini menunjukkan bahwa di tengah perlambatan global, Indonesia masih memiliki basis domestik yang cukup kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](http://BadanPusatStatistikIndonesia))

Dari sisi distribusi sosial, terdapat perkembangan yang patut dicatat. BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Gini ratio juga turun menjadi 0,363, menurun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Namun data yang sama juga menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh di atas kemiskinan perkotaan 6,60 persen, sedangkan gini ratio perkotaan tetap lebih tinggi daripada perdesaan. Dengan demikian, perbaikan agregat belum menghapus dualisme wilayah dan struktur sosial-ekonomi Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](http://BadanPusatStatistikIndonesia))

Bank Indonesia pada Januari 2026 menilai ekonomi global masih melambat dan penuh ketidakpastian, dipicu oleh tarif resiprokal Amerika Serikat, fragilitas rantai pasok, serta ketegangan geopolitik. Dalam konteks itu, BI memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7 persen, dengan neraca pembayaran yang tetap relatif solid dan cadangan devisa pada akhir Desember 2025

sebesar US\$156,5 miliar atau setara 6,4 bulan impor. Penilaian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan Indonesia bertumpu pada penguatan permintaan domestik, stabilitas rupiah, dan sinergi kebijakan fiskal-moneter. Tetapi proyeksi tersebut juga menyiratkan bahwa daya tahan domestik harus terus diperkuat, karena guncangan global berpotensi menekan aliran modal, nilai tukar, dan pembiayaan pertumbuhan. ([Bank Indonesia](#))

Perkembangan 7 April 2026 memperlihatkan dengan jelas betapa erat hubungan antara kondisi global dan stabilitas domestik. Reuters melaporkan bahwa Bank Indonesia harus melakukan intervensi di pasar valas setelah rupiah mencapai rekor terendah Rp17.090 per dolar AS. Menurut BI, pelemahan rupiah terutama dipicu faktor global, termasuk reaksi pasar terhadap perang yang melibatkan Iran dan lonjakan risiko energi. Peristiwa ini penting secara analitis: bahkan ketika indikator pertumbuhan dan kemiskinan membaik, ekonomi Indonesia tetap rentan terhadap shock eksternal melalui kanal nilai tukar, harga energi, dan sentimen investor. Ketahanan ekonomi nasional karena itu tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kapasitas menyerap gejolak global. ([Reuters](#))

Dalam bidang digital, Indonesia juga berada pada posisi yang ambivalen. Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen lalu lintas global ChatGPT pada pertengahan 2025 berasal dari negara berpendapatan menengah, termasuk Indonesia. Ini menandakan tingginya adopsi teknologi AI generatif. Namun tingkat adopsi tidak sama dengan kedaulatan teknologi. Jika Indonesia hanya menjadi pasar pengguna AI tanpa membangun kapasitas compute, data lokal, talenta, dan tata kelola yang memadai, maka nilai tambah terbesar akan tetap mengalir ke luar. Oleh karena itu, agenda ekonomi politik Indonesia ke depan tidak cukup hanya mempertahankan pertumbuhan 5 persen, tetapi juga membangun fondasi strategis

untuk pangan, energi, manufaktur, dan AI secara simultan. ([World Bank](#))

10. Implikasi Kebijakan: Mencari Sintesis Baru

Pelajaran utama dari transformasi ekonomi dan politik kontemporer adalah bahwa dikotomi lama “negara versus pasar” tidak lagi memadai. Dunia yang semakin tidak pasti justru memerlukan negara yang cukup kuat untuk membangun kapasitas nasional, tetapi juga cukup akuntabel agar kekuatannya tidak berubah menjadi dominasi elite. WTO dan IMF menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dan shock geopolitik dapat mengubah prospek pertumbuhan secara signifikan. Karena itu, negara harus mampu membaca risiko, membangun ketahanan, dan mengoordinasikan respons fiskal, moneter, industri, dan sosial. Namun perluasan peran negara harus dibarengi transparansi, evaluasi, dan pengawasan publik yang kuat. ([World Trade Organization](#))

Agenda kedua adalah kontrak sosial baru untuk pasar kerja. Data ILO memperlihatkan bahwa masalah utama dunia kerja saat ini bukan hanya pengangguran, tetapi tingginya pengangguran pemuda, kembalinya kerja informal, dan lemahnya penciptaan decent jobs. Dalam konteks AI, UNCTAD menambahkan bahwa hingga 40 persen pekerjaan global dapat terdampak oleh otomatisasi. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu bergeser dari orientasi kuantitatif menuju orientasi kualitas: reskilling, upskilling, perlindungan sosial portabel, transisi kerja yang adil, dan dukungan bagi sektor-sektor produktif yang menciptakan pekerjaan bermutu. Tanpa itu, pertumbuhan akan terus bertabrakan dengan rasa tidak aman sosial. ([International Labour Organization](#))

Agenda ketiga adalah tata kelola digital dan AI. Bank Dunia menekankan pentingnya empat fondasi AI—connectivity, compute, context, dan competency—sementara kajian tentang platform digital

menunjukkan tingginya konsentrasi kuasa pada arus data internet global. Untuk negara seperti Indonesia, ini berarti investasi pada pusat data, komputasi, talenta digital, interoperabilitas, perlindungan data, dan penegakan persaingan harus dianggap sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan agenda teknis semata. Jika tidak, negara hanya akan menjadi pengguna teknologi yang nilainya ditangkap pihak luar. ([World Bank](#))

Agenda keempat adalah memulihkan legitimasi politik. V-Dem menunjukkan bahwa demokrasi global melemah dan kebebasan berekspresi semakin tertekan. Dalam kondisi demikian, negara yang strategis justru harus lebih berhati-hati agar tidak menjadikan ketidakpastian global sebagai pembenaran permanen untuk menutup ruang kritik. Pembangunan yang berhasil pada era ini adalah pembangunan yang mampu menghubungkan ketahanan ekonomi dengan kepercayaan publik. Dengan kata lain, masyarakat harus melihat bahwa strategi negara tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan. ([v-dem.net](#))

11. Penutup

Transformasi ekonomi dan politik kontemporer di era ketidakpastian global menunjukkan bahwa pertumbuhan, ketimpangan, teknologi, keamanan, dan legitimasi tidak lagi dapat dibahas secara terpisah. Dunia masih bertumbuh, tetapi tumbuh dalam keadaan rapuh. Perdagangan masih berlangsung, tetapi di bawah bayang-bayang tarif, blokade, dan ketidakpastian kebijakan. Negara kembali tampil sebagai aktor strategis, tetapi kembalinya negara juga membawa risiko pemusatan kekuasaan. Teknologi AI membuka peluang produktivitas baru, tetapi sekaligus mempercepat konsentrasi kekuatan ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua gejala itu menegaskan bahwa ekonomi politik kontemporer adalah persoalan

tentang siapa yang membentuk perubahan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung ongkosnya. ([IMF](#))

Makalah ini menunjukkan bahwa ketidakpastian global bukan sekadar latar belakang, melainkan kondisi struktural baru. UNDP memperlihatkan bahwa kemajuan pembangunan manusia global melambat tajam dan jurang antarnegara melebar kembali. ILO menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan tetap menjadi problem mendasar. V-Dem mengingatkan bahwa demokrasi dunia sedang mundur. Bank Dunia dan UNCTAD menegaskan bahwa AI berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru, tetapi juga sumber ketimpangan dan ketergantungan baru. Karena itu, menjawab transformasi ekonomi-politik kontemporer tidak cukup dengan mengejar pertumbuhan angka semata; yang dibutuhkan adalah desain institusional yang dapat menghubungkan efisiensi dengan pemerataan, inovasi dengan perlindungan, dan negara strategis dengan akuntabilitas demokratis. ([Human Development Reports](#))

Bagi Indonesia, tantangannya ialah mengubah capaian makro yang relatif baik menjadi fondasi jangka panjang bagi kemandirian strategis dan keadilan sosial. Pertumbuhan 5,11 persen, kemiskinan 8,25 persen, dan gini ratio 0,363 adalah kemajuan yang penting, tetapi belum cukup. Indonesia masih harus menghadapi dualisme kota-desa, kerentanan pasar kerja, ketergantungan teknologi, dan keterpaparan terhadap shock global seperti yang tampak pada gejolak rupiah April 2026. Masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun negara yang efektif tetapi tidak tertutup, pasar yang produktif tetapi tidak oligarkis, dan masyarakat yang inovatif tetapi tidak ditinggalkan dalam transisi. Itulah inti dari transformasi ekonomi dan politik kontemporer di era ketidakpastian global. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Autokrasi

Sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada sedikit aktor dan membatasi kompetisi politik, kebebasan sipil, atau akuntabilitas publik. (v-dem.net)

Demokrasi liberal

Bentuk demokrasi yang tidak hanya memiliki pemilu, tetapi juga rule of law, kebebasan sipil, dan checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif. (v-dem.net)

Ekonomi politik

Pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara kekuasaan, institusi, pasar, distribusi sumber daya, dan legitimasi sosial. ([World Trade Organization](http://WorldTradeOrganization.org))

Geoeconomics

Penggunaan instrumen ekonomi seperti tarif, sanksi, investasi, kontrol ekspor, atau rantai pasok untuk tujuan strategis dan politik. ([World Trade Organization](http://WorldTradeOrganization.org))

Trade policy uncertainty

Ketidakpastian yang timbul karena pelaku ekonomi sulit memprediksi arah kebijakan perdagangan, termasuk tarif dan pembatasan impor-ekspor. ([World Trade Organization](http://WorldTradeOrganization.org))

Gini ratio

Ukuran statistik untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; makin tinggi nilainya, makin timpang distribusinya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](http://BadanPusatStatistikIndonesia.org))

HDI (Human Development Index)

Indeks pembangunan manusia yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. ([Human Development Reports](#))

Working poverty

Kondisi ketika seseorang bekerja tetapi tetap hidup dalam kemiskinan atau penghasilan yang sangat rendah. ([International Labour Organization](#))

Small AI

Pendekatan AI yang lebih murah, lebih ringan, dan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal, terutama bagi negara berkembang. ([World Bank](#))

Compute

Kapasitas komputasi yang menopang AI, termasuk chip, server, pusat data, dan layanan cloud. ([World Bank](#))

Konsentrasi pasar digital

Keadaan ketika data, lalu lintas internet, platform, atau infrastruktur digital dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. ([World Bank](#))

Ketahanan ekonomi

Kemampuan suatu ekonomi untuk menyerap, beradaptasi, dan pulih dari guncangan eksternal seperti perang, gejolak energi, atau volatilitas keuangan. ([Reuters](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *In September 2025, the percentage of the poor population decreased to 8.25 percent.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *The Gini ratio in September 2025 was 0.363.*

Bank Indonesia. (2026, January 21). *BI-Rate held at 4.75%: Strengthening economic growth, maintaining stability.*

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025.*

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, October 2025: Global economy in flux, prospects remain dim.*

International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook, April 2026; Chapter 2: Defense spending: Macroeconomic consequences and trade-offs.*

Reuters. (2026, April 6). *Middle East war means "all roads" lead to higher prices, slower growth, IMF chief says.*

Reuters. (2026, April 7). *From falling U.S. wealth to Indian factory closures, oil shock raises global recession risk.*

Reuters. (2026, April 7). *Heads of IEA, IMF, World Bank to meet next Monday to discuss energy crisis.*

Reuters. (2026, April 7). *Central banks' concern over rising geopolitical tensions surges, survey shows.*

Reuters. (2026, April 7). *Indonesia's central bank intervenes in FX market after the rupiah hits a record low.*

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *Technology and innovation report 2025: Inclusive artificial intelligence for development.*

United Nations Conference on Trade and Development. (2025, April 7). *AI's \$4.8 trillion future: UN Trade and Development alerts on divides, urges action.*

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI.*

V-Dem Institute. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg.

World Bank. (2021). *Antitrust and digital platforms: An analysis of global patterns and approaches by competition authorities.*

World Bank. (2025). *Digital progress and trends report 2025: Strengthening AI foundations.*

World Trade Organization. (2025). *Global trade outlook and statistics, April 2025.*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d6386a-621c-83a0-bebe-7b2a4b62b7c5>